



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
UNIT KERJA : SEKRETARIAT UTAMA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN
2. Jabatan : KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI
3. NHK : 931846

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.590.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/74 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 160.050.000

- MOTOR, HONDA NEW REVO CW MMC Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
- MOTOR, HONDA NF11T11C01 M/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.550.000
- MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5 S Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 4.200.000

D. SURAT BERTAHAPAN Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 18.674.535

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.772.924.535

III. HUTANG Rp. 431.444.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.341.480.535

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.